

III. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Usahatani kelapa sawit di Kecamatan Pelepat dilakukan dengan dua pola utama, yaitu pola swadaya dan pola mitra. Petani swadaya mengelola usahataniya secara mandiri tanpa dukungan dari perusahaan, sedangkan petani mitra bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit (PT. Prima Mas Lestari) melalui sistem kemitraan yang mencakup penyediaan input produksi, pelatihan teknis, serta pemasaran hasil panen dengan sistem Delivery Order (DO). Perbedaan signifikan ditemukan dalam hal penggunaan input, biaya produksi, dan harga jual TBS.
2. Pendapatan rata-rata petani pola mitra adalah sebesar Rp 28.845.311/ha/tahun, sedangkan pendapatan petani pola swadaya sebesar Rp 25.334.356 /ha/tahun. Meskipun petani mitra mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi, pendapatan mereka juga lebih besar karena dukungan perusahaan dalam hal input dan pemasaran.
3. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara pendapatan petani pola mitra dan pola swadaya, dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pola kemitraan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Pelepat

5.2 Saran

1. Bagi Petani : Petani kelapa sawit, khususnya yang masih menjalankan pola swadaya, disarankan untuk mempertimbangkan pola kemitraan dengan perusahaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui akses terhadap input produksi, pelatihan teknis, serta kepastian pasar. Namun, petani juga perlu memahami dengan baik sistem dan kewajiban dalam kemitraan, termasuk sistem kredit input dan konsekuensinya.
2. Bagi Perusahaan Mitra (PT. Prima Mas Lestari) : Diharapkan perusahaan dapat memperluas jangkauan kemitraan dan meningkatkan transparansi dalam sistem kredit serta pembagian hasil panen. Perusahaan juga sebaiknya memberikan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis agar petani mitra dapat mengelola kebun secara lebih efisien dan mandiri dalam jangka panjang.
3. Bagi Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan koperasi petani swadaya agar mereka memiliki daya tawar lebih tinggi dalam penjualan TBS dan mendapatkan akses ke pelatihan serta teknologi pertanian. Selain itu, regulasi mengenai kemitraan juga perlu diawasi agar tidak merugikan salah satu pihak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk studi-studi serupa di wilayah lain atau dengan menambahkan variabel lain seperti analisis efisiensi teknis, sosial ekonomi petani, atau dampak jangka panjang kemitraan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani.